



Urgensi Laporan Kinerja dalam Mendukung Proses Akreditasi Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta

Unyil

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga
unyil.info@gmail.com

Labibah

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
labibah@uin-suka.ac.id

Received: 31 Mei 2023

Accepted: 11 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

ABSTRACT - The purpose of this research is to determine the urgency of performance reports in supporting the "APMD" Village Community Development College Library Accreditation Process. The method used is descriptive qualitative, which aims to understand the facts in the field regarding behavior, perceptions and actions related to the Urgency of Performance Reports in Supporting the STPMD "APMD" Yogyakarta Library Accreditation Process. Research data was obtained from March to June 2023. The research results show that since the establishment of the Yogyakarta "APMD" Village Community Development College in 1965, until 2019, there has been no thought regarding library accreditation that can provide services to users in supporting the implementation of the Tri Dharma of Higher Education Tall. The STPMD "APMD" Yogyakarta Library has never made a performance report. Therefore, for the report component using either a 6 or 9 component instrument, the answer is option (e) with a score of 1. It can be concluded that library performance reports play an important role in supporting the library accreditation process.

Keywords: Urgency; Performance Report; Library Accreditation

ABSTRAK - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Laporan Kinerja dalam Mendukung Proses Akreditasi Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fakta-fakta di lapangan mengenai perilaku, persepsi, dan tindakan terkait Urgensi Laporan Kinerja dalam Mendukung Proses Akreditasi Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari bulan Maret sampai Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berdirinya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 1965, hingga tahun 2019, tidak ada pemikiran terkait akreditasi perpustakaan yang dapat memberikan pelayanan kepada pengguna dalam mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta belum pernah membuat laporan kinerja. Oleh karena itu, untuk komponen laporan baik menggunakan instrumen 6 atau 9 komponen, jawabannya ada pada opsi (e) dengan skor 1. Dapat disimpulkan bahwa laporan kinerja perpustakaan memainkan peran penting dalam mendukung proses akreditasi perpustakaan.

Kata kunci: Urgensi; Laporan Kinerja; Akreditasi Perpustakaan

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan elemen integral dari lembaga pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Sebagai pusat sumber daya ilmiah dan literatur, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses informasi, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan akademis. Dengan koleksi yang luas dan layanan yang disediakan, perpustakaan menjadi fondasi bagi pengembangan intelektual dan pertumbuhan ilmiah dalam komunitas akademik (Komarudin, 2022). Perpustakaan adalah landasan utama informasi yang memegang peranan penting dalam penyebaran pengetahuan. Dengan cakupan yang meliputi berbagai disiplin ilmu, dari ekonomi hingga politik, seni, kesehatan, dan lebih banyak lagi, perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang tak tergantikan. Keberadaannya yang mendalam dalam beragam bidang ilmu membuatnya menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan intelektual di berbagai komunitas akademik dan masyarakat (Labibah &

Pitri, 2022) Perpustakaan senantiasa dipertanyakan keberadaan dan kiprahnya dalam mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa, ada yang menganggap perpustakaan hanya sekedar sebagai syarat pelengkap berdirinya sebuah perguruan tinggi dan ada juga yang menjadikan perpustakaan sebagai tempat mengasingkan pegawai atau staf yang dianggap sudah tidak produktif. Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10, Perpustakaan Perguruan Tinggi diakui sebagai bagian integral dari aktivitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan ini menyoroti peran sentral perpustakaan dalam mendukung fungsi utama perguruan tinggi, yang meliputi memberikan akses ke sumber daya informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan staf pengajar, mendukung kegiatan penelitian dengan menyediakan literatur dan referensi yang relevan, serta memberikan layanan kepada masyarakat umum sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan dan pencerahan komunitas. Dengan demikian, perpustakaan bukan hanya tempat untuk menyimpan dan

meminjam buku, tetapi juga menjadi jantung intelektualitas dan pendorong perkembangan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menegaskan peran yang krusial dari perpustakaan dalam mendukung tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sumber daya intelektual utama di lingkungan perguruan tinggi, perpustakaan tidak hanya menyediakan akses ke berbagai literatur dan sumber informasi yang relevan untuk kegiatan akademik, tetapi juga menjadi tempat yang memfasilitasi penelitian dan inovasi. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat literasi yang berperan dalam mengedukasi masyarakat melalui program-program pendidikan informal dan layanan informasi yang diberikan kepada publik secara luas. Dengan demikian, perpustakaan menjadi pilar penting dalam mewujudkan misi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat pengetahuan dan informasi, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk akses literatur akademik,

tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan profesional bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum. Dengan menyediakan akses yang memadai terhadap beragam koleksi dan layanan, perpustakaan memfasilitasi proses belajar-mengajar, menopang aktivitas penelitian, serta memperluas cakupan pengabdian ilmiah kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, peran perpustakaan dalam mendukung tridharma perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mencapai misi dan visi pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, penelitian yang berdampak, serta pelayanan yang berdaya guna bagi masyarakat. Sebagai pusat sumber daya informasi, perpustakaan memberikan akses yang penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang relevan. Dengan mengakui pentingnya perpustakaan dalam konteks ini, regulasi memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan di perguruan tinggi. Langkah-langkah regulasi tersebut mencakup standar yang jelas terkait infrastruktur, koleksi, layanan, dan

manajemen perpustakaan. Dengan demikian, perguruan tinggi didorong untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan perpustakaan mereka agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan mendukung kegiatan akademik, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Perpustakaan menjadi tempat bagi individu untuk menggali sumber daya intelektual yang diperlukan untuk menunjang proses belajar-mengajar, mengembangkan penelitian, dan memperluas wawasan dalam berbagai bidang. Dengan koleksi yang komprehensif dan layanan yang efisien, perpustakaan tidak hanya memfasilitasi akses terhadap literatur akademik, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan literasi informasi, kritis, dan analitis. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan potensi akademik dan profesional bagi para pengguna, serta mendukung upaya perguruan tinggi dalam mencapai standar keunggulan

dalam pendidikan dan penelitian. Penegasan ini menandakan bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, melainkan sebuah lembaga yang mendukung secara langsung proses pembelajaran, penelitian, dan memberikan akses kepada informasi yang relevan kepada masyarakat umum. Sebagai pusat pengetahuan, perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi, dan mendukung pembangunan komunitas secara luas. Dengan menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi, mulai dari buku cetak hingga koleksi digital, perpustakaan memberikan mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam. Selain itu, perpustakaan juga sering menjadi tempat untuk berbagai kegiatan akademik dan budaya, seperti diskusi, seminar, dan pameran, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan intelektual dan sosial komunitas akademik dan masyarakat sekitarnya. Perpustakaan bukan hanya sekadar tempat penyimpanan buku dan materi

bacaan, tetapi juga merupakan ruang intelektual yang aktif, tempat berbagai ide dan pengetahuan bertemu dan berkembang. Dengan koleksi yang luas dan beragam, perpustakaan menyediakan akses ke literatur dan sumber daya informasi yang relevan dengan bidang studi yang beragam, mendukung mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Selain itu, perpustakaan juga menjadi tempat untuk kegiatan kolaborasi, diskusi, dan pertukaran ide, yang mendorong terciptanya lingkungan yang merangsang kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan pemikiran kritis, penelitian berkualitas, dan pertumbuhan intelektual, yang pada gilirannya berkontribusi pada kemajuan pendidikan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Melalui koleksi yang beragam dan layanan yang komprehensif, perpustakaan menjadi tempat di mana mahasiswa, dosen, dan peneliti dapat mengakses sumber daya informasi yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran, penelitian, dan

pengembangan karier. Selain itu, perpustakaan juga menjadi tempat bertemunya berbagai gagasan dan pandangan, yang dapat merangsang kolaborasi dan inovasi di antara anggota komunitas akademik. Dengan menyediakan akses terhadap pengetahuan dan informasi, perpustakaan perguruan tinggi membantu memperkuat kapasitas intelektual dan profesional masyarakat, sehingga berkontribusi secara signifikan pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Dengan mengakui peran yang sangat penting ini, regulasi memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan investasi dan pengembangan perpustakaan sebagai bagian tak terpisahkan dari misi pendidikan tinggi. Langkah-langkah tersebut mencakup alokasi sumber daya yang memadai untuk memperluas koleksi, meningkatkan fasilitas, dan meningkatkan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, regulasi juga mendorong integrasi teknologi informasi yang canggih dalam manajemen perpustakaan, seperti sistem manajemen perpustakaan digital dan akses online ke sumber daya elektronik. Dengan demikian, investasi

dan pengembangan perpustakaan tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai strategi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Pasal ini menegaskan pentingnya perpustakaan dalam mendukung fungsi inti perguruan tinggi, seperti penyediaan sumber daya untuk pembelajaran, penelitian, dan akses publik terhadap informasi ilmiah. Dengan pengakuan ini, perpustakaan dianggap sebagai aset kritis dalam memajukan pendidikan dan kemajuan ilmiah di masyarakat. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber daya kritis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Dengan demikian, perannya sebagai pusat sumber belajar tidak tergantikan dalam upaya mendorong kemajuan ilmiah dan akademis di lingkungan perguruan tinggi (Republik Indonesia, 2014).

Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional

Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Standar tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen perpustakaan, koleksi, layanan, sumber daya informasi elektronik, infrastruktur, dan pengelolaan data. Dengan mematuhi standar ini, perpustakaan dapat memastikan bahwa operasinya sejalan dengan praktik terbaik dalam industri perpustakaan, serta dapat memberikan layanan yang berkualitas dan relevan bagi seluruh komunitas perguruan tinggi. Selain itu, standar nasional juga membantu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan perpustakaan, serta memungkinkan perbandingan kinerja antarperpustakaan untuk tujuan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dapat menjalankan peran mereka secara efektif dalam mendukung misi pendidikan tinggi. Standar ini tidak hanya menetapkan

prinsip-prinsip terkait manajemen, koleksi, dan layanan perpustakaan, tetapi juga mengatur aspek-aspek teknis seperti infrastruktur dan sistem informasi. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan perpustakaan perguruan tinggi dapat beroperasi secara efektif, menyediakan layanan berkualitas, dan memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan baik. Standar ini menjadi panduan penting dalam mengatur berbagai aspek yang terkait dengan manajemen, koleksi, layanan, dan infrastruktur perpustakaan, sehingga memastikan bahwa perpustakaan dapat beroperasi secara efisien dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna di lingkungan perguruan tinggi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 menegaskan bahwa setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adopsi standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa perpustakaan di setiap perguruan tinggi mematuhi prinsip-prinsip kualitas dan layanan yang ditetapkan secara nasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap

standar tersebut, diharapkan kualitas layanan perpustakaan dapat ditingkatkan secara merata di seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan sebagai kerangka kerja yang diperlukan dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi. Dengan mengacu pada standar tersebut, penyelenggara dan pengelola perpustakaan dapat memastikan bahwa operasinya sesuai dengan praktik terbaik yang telah diakui secara nasional. Selain itu, kepatuhan terhadap Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi juga membantu meningkatkan kualitas layanan, manajemen koleksi, infrastruktur teknologi informasi, serta efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan demikian, Pasal 3 memberikan landasan yang kuat bagi upaya pemenuhan standar dan peningkatan kinerja perpustakaan perguruan tinggi guna memberikan layanan yang optimal kepada komunitas perguruan tinggi dan masyarakat umum. Hal ini menegaskan pentingnya pematuhan terhadap standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa operasional perpustakaan berjalan

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan mengikuti standar ini, diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan tinggi secara efektif. Pedoman ini memberikan arahan yang jelas tentang tata kelola, pengelolaan koleksi, penyediaan layanan, dan infrastruktur perpustakaan yang optimal. Dengan patuh terhadap standar ini, diharapkan perpustakaan dapat berperan maksimal dalam mendukung kegiatan akademis dan pengembangan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi (Perpustakaan Nasional RI, 2017). Standar Nasional Perpustakaan sering disebut SNP merupakan kitab petunjuk penyelenggaraan khusus bagi tiap-tiap tipe perpustakaan salah satunya perpustakaan perguruan tinggi, hal tersebut mengingat pentingnya peran dan fungsi perpustakaan dalam memberi layanan kepada pemustaka.

Salah satu yang harus di perhatikan dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi adalah menyampaikan laporan kinerja kepada rektor atau ketua lembaga Pendidikan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan (Perpustakaan Nasional RI, 2017). Perpustakaan yang diselenggarakan harus menjamin kualitas dalam hal ini mutu perpustakaan yang diselenggarakan, untuk mengukur dan memastikan keterjaminan mutu perpustakaan harus terakreditasi dari LAP-N atau dikenal dengan nama Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional bagi perpustakaan yang sudah terakreditasi akan diberi sertifikat yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai bukti kalau perpustakaan yang bersangkutan sudah terakreditasi, dengan pradikat A, B, atau C.

Perpustakaan di Indonesia saat ini berjumlah 164.610 dari jumlah tersebut terdapat 2.057 Perpustakaan Perguruan Tinggi, dari 2.057 tersebut yang baru terakreditasi sebanyak 722 perpustakaan (Satudata Perpusnas RI, 2021). Perpustakaan di Yogyakarta mencapai 3.363 perpustakaan dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 108, yang baru terakreditasi sebanyak 48 perpustakaan artinya ada 60 perpustakaan perguruan tinggi yang belum terakreditasi (Satudata Perpusnas RI, 2021), salah satunya Perpustakaan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Berangkat dari data tersebut kita bisa melihat secara langsung keberadaan dari masing-masing perpustakaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut pada prinsipnya sudah memenuhi standar minimal C, namun pengelola perpustakaan tidak mengajukan untuk diakreditasi LAP-N. Apa alasannya Pengelola perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tidak siap untuk diakreditasi.

Observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Maret 2023 Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, perpustakaan sampai saat ini belum terakreditasi. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Perpustakaan.

"sejak tahun 2020 kita sudah melakukan persiapan untuk di akreditasi dengan mempelajari instrumen akreditasi namun terbentur dengan pandemi, kemudian di tahun 2021 kembali dipelajari namun sampai hari ini belum terlaksana waktu itu masih menggunakan instrument yang 6 (enam) komponen sekarang sudah yang 9 (Sembilan) komponen dari yang sudah kita pelajari masih banyak dokumen pendukung yang belum tersedia jadi kita harus

membuatnya terlebih dahulu sementara SDM kita kurang".
(Kepala Perpustakaan, 2023)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pasal 2 menjelaskan bahwa Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari enam komponen. Penjelasan ini menandakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kinerja perpustakaan dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Keenam komponen tersebut mencakup aspek manajemen, pelayanan, koleksi, fasilitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan memperhatikan keseluruhan komponen tersebut, proses akreditasi dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas dan kelayakan lembaga perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menggariskan elemen-elemen penting yang harus dievaluasi dalam proses akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, termasuk aspek manajemen, ketersediaan sumber daya,

layanan, dan kebijakan yang relevan. Dengan adanya instrumen akreditasi yang komprehensif ini, diharapkan perguruan tinggi dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Komponen-komponen tersebut merupakan landasan yang penting dalam mengevaluasi kualitas dan kinerja perpustakaan di tingkat perguruan tinggi. Dengan mengikuti instrumen akreditasi ini, diharapkan perpustakaan dapat terus meningkatkan standar pelayanan dan kontribusinya terhadap kegiatan akademik dan penelitian di institusi pendidikan tinggi (Perpustakaan Nasional RI, 2018). Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, jumlah komponen instrumen tersebut ditingkatkan menjadi sembilan. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 12 Desember 2022. Perubahan ini menunjukkan upaya untuk memperluas cakupan evaluasi terhadap kualitas dan kinerja perpustakaan di perguruan tinggi. Diharapkan, instrumen akreditasi yang baru ini dapat menjadi panduan yang

lebih komprehensif bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan mereka (Perpustakaan Nasional RI, 2002).

Salah satu komponen yang harus disertakan adalah pelaporan kinerja perpustakaan yang telah disahkan oleh kepala perpustakaan selama tiga tahun terakhir. Pelaporan ini mencakup laporan tahunan, triwulanan, dan bulanan yang menggambarkan capaian serta kinerja perpustakaan selama periode tersebut. Melalui pelaporan yang teratur dan terverifikasi, institusi dapat mengevaluasi progres dan pencapaian perpustakaan serta mengidentifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, pelaporan kinerja menjadi alat yang sangat penting dalam memantau dan meningkatkan efektivitas layanan perpustakaan di perguruan tinggi. Pelaporan ini meliputi laporan tahunan, triwulan, dan bulanan. Dengan menyertakan berbagai jenis laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja perpustakaan serta memungkinkan untuk pemantauan dan evaluasi yang lebih terperinci terhadap pencapaian tujuan

dan kualitas layanan yang disediakan (Perpustakaan Nasional RI, 2002).

B. LANDASAN TEORI

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi merujuk pada keharusan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting. Konsep ini menekankan pada kebutuhan atau pentingnya suatu hal yang harus segera diperhatikan atau ditindaklanjuti. Dalam berbagai konteks, pemahaman akan urgensi sangatlah vital karena memungkinkan kita untuk mengenali prioritas dan mengambil tindakan yang sesuai dalam menghadapi situasi yang mendesak (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Urgensi merujuk pada kondisi di mana kita harus memberikan perhatian dan tindakan segera terhadap sesuatu yang membutuhkan perhatian mendesak. Ini mencerminkan pentingnya suatu hal yang membutuhkan penanganan cepat dan efektif. Memahami urgensi adalah kunci dalam mengenali prioritas dan mengambil tindakan yang sesuai dalam menghadapi situasi yang memerlukan respons cepat (Ernawati, 2021).

2. Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah bentuk konkret dari akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah. Dalam konteks ini, laporan kinerja tidak hanya menjadi alat untuk memantau pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai mekanisme transparansi yang memungkinkan publik untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah tersebut. Melalui laporan kinerja, instansi pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terinci tentang efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dalam laporan ini, instansi pemerintah memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang capaian kinerja mereka dalam periode waktu tertentu, yang mencakup pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, serta dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan menyajikan data dan informasi yang relevan dan terperinci, laporan kinerja memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap kinerja instansi pemerintah, serta memberikan dasar

untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, laporan kinerja juga menjadi alat penting untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh instansi pemerintah. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja, laporan kinerja membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Laporan kinerja tidak hanya menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti publik, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai upaya dan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, laporan kinerja bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam

membangun transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menyajikan data-data terkait pencapaian, aktivitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan, laporan ini tidak hanya memungkinkan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, namun juga memberikan gambaran yang jelas mengenai transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, laporan kinerja juga menjadi alat yang memudahkan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta peluang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui laporan ini, instansi tersebut memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil kerjanya kepada pihak yang memberikan mandat atau kepada masyarakat secara umum. Laporan kinerja menjadi alat yang penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

dari kegiatan yang dilaksanakan, serta dalam menunjukkan komitmen instansi pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Melalui laporan ini, instansi tersebut mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah mereka terima. Laporan kinerja menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan, serta menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penyusunan laporan kinerja memerlukan penekanan pada beberapa aspek utama, di antaranya adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis yang komprehensif terhadap pengukuran kinerja tersebut. Melalui pengukuran kinerja, instansi atau organisasi dapat mengidentifikasi sejauh mana capaian mereka terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi menyediakan pemahaman mendalam tentang efektivitas strategi dan kebijakan yang diimplementasikan. Sedangkan pengungkapan hasil analisis memberikan gambaran yang jelas kepada pihak terkait mengenai performa dan kinerja instansi atau organisasi secara keseluruhan

(Bagian Organisasi, 2018). Laporan kinerja adalah dokumentasi dari hasil kerja individu atau sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya laporan ini terletak pada kemampuannya untuk mengukur pencapaian tersebut dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi catatan historis, tetapi juga alat evaluasi yang memungkinkan pemantauan terhadap kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan (Rofiyandi, 2022).

Tujuan utama dari pembuatan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah adalah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi tersebut. Melalui laporan ini, instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan transparansi terhadap capaian kinerja mereka kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan pertanggungjawaban kinerja memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

serta penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, laporan tersebut bukan hanya sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, mengukur efektivitas kebijakan dan program, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Laporan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pencapaian dan hasil kerja yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik serta pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban kinerja menjadi instrumen penting dalam menunjukkan komitmen instansi pemerintah dalam menjalankan amanahnya secara efektif dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui laporan ini, instansi pemerintah bertanggung jawab kepada otoritas yang memberikan kewenangan, serta kepada masyarakat umum, atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil kerjanya. Laporan pertanggungjawaban kinerja juga

bertujuan untuk memberikan informasi transparan dan akurat kepada pihak terkait tentang efektivitas dan efisiensi kinerja instansi tersebut (Hasibuan & Syafina, 2022).

3. Akreditasi Perpustakaan

Proses akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan formal yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam pengelolaan perpustakaan. Melalui proses ini, lembaga perpustakaan dinilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan, termasuk aspek seperti koleksi, layanan, infrastruktur, tenaga profesional, dan tata kelola. Akreditasi merupakan proses penting yang memastikan bahwa lembaga perpustakaan menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien, serta memberikan layanan yang berkualitas kepada pengguna. Selain itu, akreditasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan citra lembaga perpustakaan di mata masyarakat, serta membantu dalam meningkatkan mutu layanan dan pengelolaan perpustakaan secara keseluruhan. Dalam proses ini, lembaga akreditasi perpustakaan melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap berbagai aspek kinerja perpustakaan, termasuk manajemen koleksi, layanan kepada pengguna, infrastruktur, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya informasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup prinsip-prinsip terbaik dalam bidang perpustakaan dan informasi. Hasil dari proses akreditasi ini memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan bahwa perpustakaan telah memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional perpustakaan tersebut. Melalui proses ini, berbagai aspek dari manajemen perpustakaan dievaluasi dengan cermat, termasuk koleksi, layanan, fasilitas, dan kebijakan yang terkait. Tujuan utama dari akreditasi adalah untuk memastikan bahwa perpustakaan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada pengguna, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui proses akreditasi, perpustakaan dievaluasi terhadap berbagai aspek kinerja, termasuk manajemen koleksi, fasilitas,

layanan, sumber daya informasi, dan infrastruktur teknologi. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana perpustakaan telah memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menjadi alat untuk memastikan kualitas layanan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja perpustakaan. Selain itu, status akreditasi juga memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa perpustakaan telah menjalankan praktik terbaik dalam pengelolaan perpustakaan dan layanan informasi. Dengan mendapatkan akreditasi, lembaga perpustakaan diberikan pengakuan formal atas komitmen mereka terhadap standar yang ditetapkan, serta mendorong upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Melalui proses ini, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap berbagai aspek, termasuk manajemen koleksi, layanan, fasilitas, dan infrastruktur perpustakaan. Tujuan akreditasi adalah untuk memastikan bahwa perpustakaan dapat menyediakan

layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan baik, sejalan dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan mendapatkan sertifikasi akreditasi, lembaga perpustakaan dapat memperoleh pengakuan formal atas komitmen mereka terhadap standar yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan layanan yang unggul kepada masyarakat. Melalui proses ini, evaluasi mendalam dilakukan untuk memastikan bahwa perpustakaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik dari segi koleksi, layanan, fasilitas, maupun manajemen. Akreditasi ini menjadi bukti formal bahwa lembaga perpustakaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada pengguna (Supriyanto, 2023). Proses akreditasi perpustakaan adalah serangkaian kegiatan formal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi perpustakaan untuk menegaskan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk koleksi, layanan, fasilitas, dan kebijakan, proses ini

bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan tersebut memberikan standar layanan yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Melalui evaluasi menyeluruh, akreditasi juga membantu meningkatkan mutu dan efektivitas pengelolaan perpustakaan, serta memperkuat posisi perpustakaan sebagai pusat informasi yang relevan dan terpercaya dalam mendukung misi pendidikan dan penelitian. Langkah-langkah dalam proses ini meliputi evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, seperti koleksi, fasilitas, layanan, tenaga profesional, dan tata kelola. Akreditasi memastikan bahwa lembaga perpustakaan telah mematuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan kualitas layanan dan pengelolaan yang optimal. Dengan demikian, akreditasi menjadi landasan yang penting untuk membangun kepercayaan pengguna dan masyarakat terhadap lembaga perpustakaan, serta sebagai alat untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan pengelolaan dalam upaya memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui evaluasi menyeluruh, lembaga akreditasi memeriksa berbagai aspek kinerja

perpustakaan, seperti manajemen koleksi, layanan kepada pengguna, infrastruktur, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya informasi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup prinsip-prinsip terbaik dalam bidang perpustakaan dan informasi. Hasil dari proses akreditasi memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perpustakaan telah memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan landasan untuk meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas operasional perpustakaan. Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk manajemen, koleksi, layanan, fasilitas, dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, akreditasi menjadi bentuk pengakuan resmi atas kualitas dan kompetensi lembaga perpustakaan dalam memberikan layanan yang memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional atau internasional. Selain itu, akreditasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dan berkualitas. Melalui evaluasi menyeluruh, berbagai aspek penting seperti koleksi, layanan,

infrastruktur, dan manajemen perpustakaan dievaluasi dengan cermat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa perpustakaan tersebut dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional atau internasional. Dengan mendapatkan akreditasi, lembaga perpustakaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap standar yang telah ditetapkan, memperkuat kepercayaan pengguna, dan meningkatkan reputasi institusi di mata masyarakat. Selain itu, akreditasi juga membantu lembaga perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan, serta memberikan dorongan untuk terus melakukan peningkatan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan demikian, tujuan akreditasi perpustakaan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga perpustakaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui akreditasi, perpustakaan diuji terhadap berbagai parameter yang mencakup manajemen

koleksi, fasilitas, layanan, keberlanjutan, dan aksesibilitas informasi. Dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan, perpustakaan dapat memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa layanan yang mereka terima memenuhi kriteria kualitas yang diakui secara luas, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Selain itu, standar yang dipatuhi juga memastikan bahwa perpustakaan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan dan penyediaan informasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat secara efektif. Dengan demikian, tujuan utama dari proses akreditasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan memastikan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang relevan dan dapat diandalkan bagi komunitas yang dilayani. Dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan, perpustakaan dapat menjamin akses yang adil dan merata terhadap sumber daya informasi bagi seluruh komunitas pengguna. Selain itu, proses akreditasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga perpustakaan, serta untuk mendorong peningkatan berkelanjutan

dalam kualitas layanan dan manajemen perpustakaan. Dengan demikian, akreditasi bukan hanya sebagai bentuk pengakuan atas kualitas perpustakaan, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki dan memperkuat peran serta kontribusi perpustakaan dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat secara luas. Dengan mendapatkan akreditasi, lembaga perpustakaan diberikan pengakuan formal atas kualitas layanan dan komitmen mereka terhadap standar yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan tersebut. Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk koleksi, layanan, fasilitas, dan manajemen. Dengan mendapatkan akreditasi, lembaga perpustakaan tersebut diakui secara resmi atas kemampuannya dalam menyediakan layanan perpustakaan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Perpustakaan Nasional RI, 2012).

4. Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta

Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta adalah perpustakaan

perguruan tinggi yang berkedudukan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang beralamat di Jalan Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kerja ilmiah dengan tujuan untuk memahami fenomena atau objek. Sehingga pemahaman tersebut dapat dipertimbangkan (Ruslan, 2003: 24). Sejalan dengan, (Sugiyono, 2010: 2) Mengungkap bahwa metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tertentu, sebenarnya menggarisbawahi bahwa metode ini merupakan proses yang sistematis dan terstruktur. Dalam menggunakan metode penelitian, peneliti mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian mereka dengan cermat. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan spesifik penelitian mereka, serta memastikan bahwa kesimpulan yang

diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mengarahkan proses penelitian ke arah yang ilmiah dan obyektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang jelas dan kebutuhan spesifik, menempatkan penelitian dalam kerangka kerja yang kokoh dan terarah. Dengan demikian, metode penelitian memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara teliti dan efektif, sesuai dengan keperluan riset yang sedang dilakukan. Metode kualitatif dianggap sebagai pendekatan holistik dan deskriptif yang mengambil bentuk kata-kata untuk menggambarkan konteks alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, memahami konteksnya dengan lebih baik, dan merangkum informasi secara lebih detail daripada metode kuantitatif (Moleong, 2011: 6). Deskriptif merupakan penjelasan terperinci mengenai situasi atau proses yang tengah diselidiki. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai objek penelitian,

sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan karakteristik, pola, dan hubungan antarvariabel yang ada dalam objek penelitian, membantu dalam memahami kompleksitas dari situasi yang sedang diteliti (Idrus, 2007: 37). Kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami fenomena dengan fokus pada apa yang dialami subjek penelitian, serta menekankan pada interpretasi mendalam dan pemahaman konteks yang melibatkan aspek-aspek kualitatif seperti makna, persepsi, dan pengalaman subjek. Oleh karena itu, penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini dapat mengungkap fakta-fakta lapangan terkait perilaku, persepsi, dan tindakan yang berkaitan dengan urgensi Laporan Kinerja dalam mendukung proses akreditasi. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran dan interaksi aspek-aspek yang relevan dalam konteks yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana setiap elemen berkontribusi dalam membentuk fenomena atau situasi yang diamati.

Dengan demikian, metode deskriptif tidak hanya memberikan gambaran yang detail, tetapi juga mengarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika dan kompleksitas dari objek penelitian di Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta yang datanya diperoleh dari bulan Maret sampai Juni 2023.

Objek penelitian yang menjadi fokus adalah Laporan Kinerja dalam Mendukung Proses Akreditasi Perpustakaan. Sementara itu, subjek penelitian merujuk pada benda, hal, atau individu tempat data tersebut berasal dan menjadi sumber informasi yang penting dalam penelitian ini. Subjek penelitian memiliki peran yang krusial dalam memberikan wawasan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk analisis data yang akurat dan komprehensif (Arikunto, 2010: 172-173). Subjek penelitian merujuk pada individu yang memberikan informasi yang relevan terhadap topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, subjek sering kali disebut sebagai informan penelitian. Peran informan sangat penting karena kontribusinya dalam memberikan wawasan, data, atau perspektif yang diperlukan oleh peneliti untuk

melengkapi studi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Informan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan objek penelitian, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang terlibat secara langsung atau memahami secara signifikan tentang objek penelitian tersebut. Peran informan sangat penting dalam memberikan wawasan yang lebih khusus dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, informan menjadi sumber utama informasi yang berharga bagi peneliti untuk memperkaya pemahaman mereka terhadap subjek penelitian. Keberadaan informan penelitian memainkan peran penting dalam memberikan perspektif yang beragam dan mendalam terhadap objek penelitian, sehingga memperkaya hasil analisis dan pemahaman yang dihasilkan dari penelitian tersebut (Bungin, 2007: 78). Subjek penelitian dalam konteks ini adalah informan yang dianggap sebagai narasumber informasi yang relevan dan berharga dalam penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang dapat

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman objek penelitian. Peran informan sebagai sumber informasi kunci memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan beragam terkait dengan topik penelitian, sehingga memperkaya analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. (Moleong, 2011: 164-165); (Bungin, 2007: 95-96). Para informan peneliti terdiri dari kepala dan staf perpustakaan yang dianggap memiliki kompetensi tertinggi untuk memberikan data yang diperlukan dalam kajian ini. Keterlibatan mereka di lembaga yang menjadi fokus penelitian adalah indikator penting untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi yang disampaikan. Dengan kehadiran informan yang memiliki posisi dan pengalaman langsung di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan relevan mengenai urgensi laporan kinerja dalam mendukung proses akreditasi perpustakaan. Informasi yang diberikan oleh informan yang berada di lapangan dapat memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana laporan kinerja memengaruhi dan mendukung proses akreditasi perpustakaan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya laporan kinerja dalam konteks akreditasi perpustakaan serta implikasinya dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan (Martha & Kresno, 2016).

Tiga teknik yang digunakan untuk mendapatkan bahan penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah salah satu metode utama pengumpulan data primer yang dilakukan melalui teknik eksplorasi untuk menyelami dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap realitas fenomena yang ada di lapangan. Observasi secara langsung memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku dan interaksi yang terjadi dalam konteks yang sebenarnya, sedangkan dokumentasi memberikan data yang bersifat tertulis atau rekaman yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam analisis penelitian. Kombinasi dari ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi riil di perpustakaan, dilakukan observasi langsung di lapangan guna mengamati secara

langsung berbagai aktivitas dan interaksi yang terjadi. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen penting terkait dengan laporan kinerja perpustakaan untuk mendapatkan data yang mendukung dan relevan. Kombinasi antara observasi langsung dan analisis dokumen diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat terkait dengan kinerja dan operasional perpustakaan (Herdiansyah, 2010: 143). Keabsahan data yang digunakan dapat diperkuat melalui penerapan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengonfirmasi dan memvalidasi temuan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan melihat data pada titik waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010: 306–308). Teknik analisis yang digunakan melibatkan analisis model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Tahap pertama, yaitu reduksi data, melibatkan pengurangan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih terkelola dan dapat dipahami dengan lebih mudah. Kemudian, tahap

penyajian data mencakup pengaturan kembali data yang telah disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan dapat dipahami dengan baik. Tahap terakhir, penarikan simpulan atau verifikasi, melibatkan proses penafsiran data yang telah disajikan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang signifikan, serta memverifikasi keabsahan temuan-temuan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, analisis data dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Reduksi data melibatkan proses penyederhanaan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih terkendali, sementara penyajian data berfokus pada pengaturan kembali data yang telah disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Tahap terakhir, penarikan simpulan atau verifikasi, melibatkan proses penafsiran data dan pembuktian atau verifikasi terhadap temuan-temuan yang dihasilkan dalam analisis. Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan akan disaring, disusun, dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan mendalam (Sugiyono, 2010:

341). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cermat untuk mengeliminasi informasi yang dianggap kurang relevan atau sudah diwakili oleh data lain yang telah digunakan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan dataset sehingga fokusnya tetap pada informasi yang paling penting dan signifikan. Penyajian data dilakukan dengan mengutip hasil wawancara secara langsung dan menggunakan data-data dokumentasi lapangan. Selain itu, dalam tahap penarikan simpulan atau verifikasi, dilakukan perbandingan antara satu set data dengan yang lainnya untuk memastikan keakuratan dan kevalidan hasil penelitian yang telah dilakukan.

D. Hasil Dan Pembahasan

Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, yang disingkat STPMD "APMD" Yogyakarta, merupakan unit penting dalam struktur perguruan tinggi yang bertugas sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dalam mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai penyedia layanan informasi dan literasi, perpustakaan tidak hanya memberikan akses kepada koleksi sumber daya, tetapi

juga berperan aktif dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 85, setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk menyediakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan, dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Penegasan ini menunjukkan pentingnya peran perpustakaan sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga pendidikan tinggi. Dengan mematuhi standar yang ditetapkan, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya informasi dan pengetahuan bagi seluruh komunitas akademiknya, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, serta masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan menjadi jembatan penting dalam mendukung misi dan visi pendidikan tinggi dalam mencapai keunggulan akademik dan kontribusi kepada masyarakat luas. Dengan demikian, standar nasional perpustakaan dan pendidikan dijadikan pedoman untuk menjamin kualitas

layanan informasi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Penegasan ini menunjukkan urgensi bagi perguruan tinggi untuk memiliki perpustakaan yang tidak hanya mencakup koleksi yang luas dan relevan, tetapi juga memiliki fasilitas dan layanan yang memadai. Dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan dan pendidikan, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum. Selain itu, hal ini juga membantu meningkatkan mutu pendidikan, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya adanya perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional, sambil memperhatikan standar nasional pendidikan secara umum. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tersedianya perpustakaan yang memenuhi standar nasional, perguruan tinggi dapat menjembatani kebutuhan akan informasi yang beragam dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, perpustakaan yang berkualitas juga memberikan dukungan penting bagi penelitian ilmiah dan pengembangan masyarakat, dengan menyediakan akses ke literatur dan sumber daya yang diperlukan untuk memajukan pengetahuan dan inovasi. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya menciptakan lingkungan akademis yang lebih produktif, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan memiliki perpustakaan yang memenuhi standar, perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikan, mendukung kegiatan penelitian, dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pasal ini menegaskan pentingnya perguruan tinggi untuk memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional, sambil tetap memperhatikan standar nasional pendidikan secara umum. Dengan

demikian, perpustakaan diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan kualitas dalam pengelolaan koleksi dan layanan, tetapi juga secara holistik menyokong tujuan pendidikan tinggi secara keseluruhan. Kesesuaian dengan standar nasional pendidikan memastikan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bacaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengetahuan yang berperan dalam mendukung kemajuan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menetapkan standar tersebut, regulasi memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pendidikan dan akademik. Lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku, perpustakaan yang memenuhi standar nasional juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penelitian yang vital bagi kesuksesan lembaga pendidikan tinggi. Dengan memperhatikan standar nasional pendidikan secara umum, perpustakaan dapat menjadi wahana yang efektif dalam memajukan pembelajaran, mendorong pemikiran kritis, dan

mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dan staf pengajar. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya menciptakan lingkungan akademis yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa perpustakaan bukan hanya merupakan sebuah fasilitas tambahan, melainkan merupakan bagian integral dari lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Dengan memenuhi standar nasional, perpustakaan dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang mendorong pembelajaran, penelitian, dan inovasi di kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti. Ini juga memastikan bahwa perguruan tinggi memberikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya informasi bagi seluruh komunitas akademik, sehingga mendukung terwujudnya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menekankan perlunya lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai dan berkualitas, yang merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi diwajibkan untuk mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Standar ini tidak hanya menjadi pedoman dalam mengatur operasional dan manajemen perpustakaan, tetapi juga menetapkan standar kualitas layanan, infrastruktur, dan koleksi yang harus dipenuhi. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang bermutu tinggi dan relevan, serta mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Melalui implementasi standar yang konsisten, perpustakaan perguruan tinggi dapat menjaga reputasi dan integritasnya sebagai pusat sumber daya informasi yang dapat diandalkan bagi seluruh komunitas akademik dan masyarakat umum. Standar ini memberikan panduan yang jelas tentang tata kelola, manajemen koleksi, pelayanan, dan infrastruktur perpustakaan yang optimal. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, sehingga mendukung misi dan tujuan

pendidikan tinggi secara keseluruhan (Perpustakaan Nasional RI, 2017).

Akreditasi Perpustakaan

Terakreditasinya perpustakaan sebagai jaminan kualitas yaitu mutu yang diberikan kepada pengguna, mana mungkin sebuah perguruan tinggi bisa mengklaim bahwa lulusan dari perguruan tinggi yang dikelolanya menghasilkan lulusan bermutu tinggi sedangkan perpustakaan sendiri tidak terjamin mutu layanannya (Hariyah, 2019). Lebih lanjut diungkapkan dalam wawancara berikut.

“...belum terakreditasi, karena kita awalnya mengutamakan pelayanan saja. Sejak 2020 kita baru mulai mengarah kesana itupun karena waktu itu salah satu pimpinan sampaikan kepada saya perpustakaan mau diakreditasi, sejak waktu itu kita mulai melakukan persiapan akreditasi dengan mempelajari instrumen saat itu masih menggunakan yang 6 (enam) komponen. Namun terhenti karena pandemic... (wawancara Infoman 1, 14 Maret 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan dari sejak berdirinya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tahun 1965 (STPMD “APMD” Yogyakarta, 2018),

hingga tahun 2019 tidak memikirkan masalah akreditasi perpustakaan bisa memberi pelayanan kepada pengguna dalam mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akreditasi baru dibicarakan pada tahun 2020 dengan mempelajari instrument akreditasi 6 (enam) komponen untuk melihat apa saja yang perlu disiapkan namun persiapan terhenti karena pandemic.

Persiapan yang Dilakukan

Persiapan akreditasi yang dilakukan oleh Perpustakaan STPMD “APMD” Yogyakarta adalah mempelajari instrumen akreditasi dan mulai melengkapi terhadap apa yang ada diinstrumen, persiapan Hal ini tampak dari hasil wawancara berikut ini.

“... persiapan pertama kita pelajari instrument, dan membagi tugas siapa yang menyiapkan komponen satu-dua, kemudian tiga-empat, dan lima-enam. Yang menjadi kendala adalah SDM, disini kita bertiga yang pustakawan satu, duanya lagi tenaga teknis yaitu tamatan SMA. Setelah kita pelajari banyak sekali dokumen yang kita tidak punya dan harus kita siapkan, sementara kita juga memberi layanan kepada pengguna... (wawancara Infoman 1, 14 Maret 2023)”.

Kendala yang dihadapi oleh perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta dalam persiapan akreditasi selain masalah pandemic juga masalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga sedikitnya waktu untuk melengkapi instrument.

Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah sebuah laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan dalam rentang waktu pertahun atau 1 (satu) tahun akademik, lihat hasil wawancara berikut.

"... belum pernah buat laporan kinerja, itu tadi kita selama ini fokus memberi layanan jadi kelengkapan administrasi jadi terabaikan. Makanya ketika kita pelajari instrument ternyata itu diminta sementara kita belum pernah buat, kita mau buat formatnya juga kita belum punya seperti apa laporannya... (wawancara Infoman 1, 14 Maret 2023)".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta belum pernah membuat laporan kinerja, padahal kita tahu bahwa penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi harus mengikuti Standar Nasional Perpustakaan

Perguruan Tinggi sebagai pedoman utama (Perpustakaan Nasional RI, 2017). Dijelaskan bahwa laporan kinerja tersebut harus disampaikan kepada rektor atau ketua lembaga Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan yang diminta adalah 1) Laporan Statistik Pengunjung, 2) Laporan statistik peminjaman dan pengembalian, dan 3) laporan statistik keterpakaian koleksi.

Berkenaan dengan komponen laporan kinerja pada instrument 6 (enam) komponen, terdapat pada komponen Komponen 5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan, dengan jumlah indikator kunci 10, Total skor maksimal 50 dengan bobot 15.

Sedangkan pada instrument 9 (Sembilan) komponen terdapat pada komponen 6 pengelolaan perpustakaan dengan indikator kunci 6 skor maksimum 30 dengan bobot 15.

Skor paling tinggi pada opsi jawaban adalah opsi (a) skor 5, (b) skor 4, (c) skor 3, (d) skor 2, dan (e) skor 1.

Berdasarkan penjelasan di atas, bila perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta belum pernah buat laporan, maka untuk komponen laporan baik menggunakan instrument 6 atau 9

komponen maka jawabannya ada pada opsi (e) dengan skor 1.

Bila kita hitung menggunakan rumus penghitungan Nilai:

Jumlah Skor : (Jumlah Soal x 5) x Bobot
Instrumen 6 komponen:

$$46 : (10 \times 5) \times 15 \\ = 13.8$$

Instrumen 9 Komponen:

$$26 : (6 \times 5) \times 15 \\ = 13$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan kinerja perpustakaan berperan penting dalam mendukung proses akreditasi perpustakaan.

E. SIMPULAN

Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, atau disingkat STPMD "APMD" Yogyakarta, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dalam mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai bagian integral dari lembaga pendidikan tinggi, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai pusat informasi dan literasi yang

menyediakan sumber daya untuk aktivitas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan koleksi yang relevan dan layanan yang memadai, perpustakaan membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung pengembangan keilmuan serta pertumbuhan intelektual bagi seluruh komunitas akademik perguruan tinggi tersebut. Sebagai penyedia layanan informasi dan literasi, perpustakaan tidak hanya memfasilitasi akses ke koleksi sumber daya, tetapi juga memainkan peran dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi.

Sejak berdirinya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 1965, hingga tahun 2019 tidak memikirkan masalah akreditasi perpustakaan bisa memberi pelayanan kepada pengguna dalam mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta belum pernah membuat laporan kinerja, padahal kita tahu bahwa penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi harus mengikuti Standar Nasional Perpustakaan

Perguruan Tinggi sebagai pedoman utama, maka untuk komponen laporan baik menggunakan instrument 6 atau 9 komponen maka jawabannya ada pada opsi (e) dengan skor 1. Laporan kinerja perpustakaan berperan penting dalam mendukung proses akreditasi perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta Pusat: Rineka Cipta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Hasil Pencarian - KBBI Daring. Diambil 7 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>

Bagian Organisasi. (2018). *Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Surabaya: Bagian Organisasi Kota Surabaya.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ernawati. (2021). *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*. Yogyakarta: Budi Utama.

Hariyah. (2019). Self Assessment sebagai Praktik Baik Menyiapkan Akreditasi Perpustakaan. *Maktabatuna*, 1(1), 55-68.

<https://doi.org/10.15548/MJ.V1I1.979>

Hasibuan, H. A., & Syafina, L. (2022). Urgensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4).

<https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13408>

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Idrus. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial : pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press.

Kepala Perpustakaan. (2023). *Kepala Perpustakaan, Wawancara Dengan Kepala Perpustakaan STPMD "APMD" Yogyakarta*. Yogyakarta: STPMD "APMD" Yogyakarta.

Komarudin. (2022). Pendekatan Andragogi Dalam Pendidikan Pemustaka Di Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Maktabatuna*, 4(2), 177-192.

<https://doi.org/10.15548/MJ.V4I2.4878>

- Labibah, & Pitri, U. E. (2022). Pelaksanaan user education sebagai upaya promosi perpustakaan pada UPT. Perpustakaan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. *IJAL (Indonesian Journal of Academic Librarianship)*, 5(2), 1-8. Diambil dari <http://www.journals.apptisjatim.org/index.php/ijal/article/view/112>
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perpustakaan Nasional. (2018). *Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2002). *Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2012). *Pedoman Akreditasi Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Diambil dari <https://jdih.perpusnas.go.id/detail/383>
- Perpustakaan Nasional RI. (2017). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2018). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Ringgi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Rofiyandi, Y. M. (2022). Pahami Pengertian Laporan Kinerja untuk Mengukur Hasil Kerja. Diambil 7 Mei 2023, dari <https://katadata.co.id/redaksi/ekopedia/62c3bf72417c5/pahami-pengertian-laporan-kinerja-untuk-mengukur-hasil-kerja>
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafin.

Satudata Perpusnas RI. (2021). Data

Akreditasi Perpustakaan

Berdasarkan Provinsi. Diambil 4

Maret 2023, dari

<https://satudata.perpusnas.go.id/index.php/2022/03/10/data-akreditasi-perpustakaan-2/>

STPMD "APMD" Yogyakarta. (2018).

Tentang Kampus – Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa

"APMD." Diambil 7 Mei 2023, dari

<https://stpmd.apmd.ac.id/tentang-kampus/>

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian*

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Supriyanto. (2023). *Kebijakan Standarisasi*

dan Akreditasi Perpustakaan. Jakarta:

Direktorat Standarisasi dan

Akreditasi Perpustakaan Nasional.